

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh anggaran berbasis kinerja, sistem pelaporan, dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dalam penelitian ini, sampel yang dipilih adalah aparatur pemerintah daerah di 23 OPD Kabupaten Banjarnegara dan diambil menggunakan teknik *purposive sampling*. Kemudian diperoleh 112 kuesioner yang sudah diisi responden dan dapat diolah. Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran berbasis kinerja yang diterapkan dengan baik maka akan mengoptimalkan penggunaan anggaran dan menciptakan transparansi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, semakin baik pelaksanaan anggaran berbasis kinerja maka akan semakin baik pula akuntabilitas kinerja pada instansi pemerintah.
2. Sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pelaporan perlu

diterapkan dalam rangka menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel di mana informasi yang dihasilkan dapat memudahkan pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, sistem pelaporan yang diterapkan dengan baik dapat mewujudkan akuntabilitas kinerja yang baik pada setiap instansi pemerintah.

3. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara. Hal ini menunjukkan dengan implementasi sistem pengendalian internal yang baik maka setiap kegiatan yang diselenggarakan dapat terkendali dan terdapat peluang yang besar dalam mencapai target yang ditetapkan. Oleh karena itu, sistem pengendalian internal yang diterapkan dengan baik dapat mewujudkan akuntabilitas kinerja yang baik pada setiap instansi pemerintah.

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini telah sesuai dengan tujuan penelitian yang dibuat oleh peneliti. Berdasarkan uji koefisien determinasi nilai *adjusted R<sup>2</sup>* yang dihasilkan adalah 0,561 atau 56,1%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini yang meliputi anggaran berbasis kinerja (X1), sistem pelaporan (X2), dan sistem pengendalian internal (X3) memiliki pengaruh sebesar 56,1% terhadap variabel dependen yaitu akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sedangkan 43,9% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

Hasil pengujian yang sejalan dengan hipotesis membuktikan bahwa ketiga variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Jika dikaitkan dengan masalah yang sudah dipaparkan pada latar belakang penelitian, maka hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara untuk meningkatkan akuntabilitas kerjanya. Setiap OPD di Kabupaten Banjarnegara perlu meningkatkan evaluasi atas pelaksanaan anggaran agar dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensinya serta dapat membantu untuk mengetahui apakah target yang ditetapkan telah tercapai. Lalu dalam upaya menyajikan laporan keuangan yang tertib dan akuntabel, diperlukan adanya informasi yang dapat digunakan untuk mengoreksi ekspektasi di masa lalu dalam laporan keuangan. Selain itu, perlu adanya pemeriksaan mendadak terhadap catatan akuntansi, fisik kas, dan barang untuk memperkuat lingkungan pengendalian dalam upaya memberikan kepastian efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan negara. Apabila hal-hal tersebut diterapkan dengan baik, maka akan menciptakan akuntabilitas kinerja pada instansi pemerintah yang baik pula dan dapat meningkatkan penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (SAKIP).

## **5.2. Keterbatasan**

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti tidak terlepas dari beberapa keterbatasan, antara lain sebagai berikut:

1. Terdapat kesulitan di mana jam kerja OPD di Kabupaten Banjarnegara lebih singkat di masa pandemi COVID-19 sehingga peneliti

membutuhkan waktu yang cukup lama dalam menyebarkan dan mengumpulkan kuesioner. Selain itu, jarak antar lokasi kantor satu dan lainnya yang cukup jauh juga menjadi kesulitan bagi peneliti.

2. Penelitian menggunakan kuesioner yang sifatnya tertutup sehingga terdapat kemungkinan jawaban responden tidak sesuai dengan keadaan di lapangan.

### **5.3. Saran**

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian yang sama, dapat menambahkan metode wawancara sehingga data yang diperoleh dapat menggambarkan keadaan yang sesungguhnya.
2. Bagi pihak pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara, penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran dalam meningkatkan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja, sistem pelaporan, dan sistem pengendalian internal sehingga akuntabilitas kinerja pada instansi pemerintah dapat semakin baik dan target yang telah ditetapkan dapat tercapai serta peringkat SAKIP dapat meningkat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, K. (2018). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Ketaatan Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta*. Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Anggarini, Y., dan Puranto, B. H (2010). *Anggaran Berbasis Kinerja: Penyusunan APBD secara Komprehensif*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. (2008). *Pengukuran Kinerja: Suatu Tinjauan pada Instansi Pemerintah*. Jakarta.
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Bernadine, R. (2018). *Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan dan Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten*. Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- \_\_\_\_\_, dan Damayanti, T. (2007). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Hartono, J. (2017). *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman Edisi 6*. Yogyakarta: BPFE.
- Hoesada, J. (2016). *Bunga Rampai Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.

Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 239/IX/6/8/2003, tentang *Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Banjarnegara 2019. Retrieved from <https://ppid.banjarnegarakab.go.id/v2/>.

Lukito, P. K. (2014). *Membumikan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik: Tantangan Berdemokrasi Ke Depan*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mahsun, M. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.

Mardiasmo. (2006). "Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana *Governance*". *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, Vol. 2, No. 1.

\_\_\_\_\_. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

\_\_\_\_\_. (2018). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi.

Noerdiawan, D. (2006). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.

Nurillah, A. S. (2014). "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kota Depok)". *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 1, No. 1.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Indonesia.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2007). *Akuntabilitas Instansi Pemerintah Edisi Kelima*. Bogor.

\_\_\_\_\_. (2011). *Akuntabilitas Instansi Pemerintah Edisi Keenam*. Bogor.

Rankin, M., Stanton, P., McGowan, S., Ferlauto, K., and Tilling, M. (2012). *Contemporary Issues in Accounting 2<sup>nd</sup> Edition*. Australia: John Wiley and Sons Australia Ltd.

Safitri, N. H. (2020). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan, Pengendalian Akuntansi, Kompetensi Aparatur Pemerintah dan Ketaatan Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah kota Yogyakarta*. Skripsi, Universitas Pembangunan "Veteran", Yogyakarta.

Samosir, T. K. J. (2020). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal, Sistem Pelaporan, Pengendalian Akuntansi, dan Anggaran Daerah Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPKAD Provinsi Sumatera Utara*. Skripsi, Universitas Sumatera Utara, Medan.

Tambuk, H. H. (2020). *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Sistem Pelaporan Kinerja, Sistem Pengendalian Internal dan Komitmen Organisasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur*. Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.